



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 100.3.7/Kep.54-KS/I/2024

TENTANG

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KERJA SAMA DAERAH PEMERINTAH
KOTA BEKASI TAHUN 2024

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 12 Seri E);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 57 Seri E);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah terkait rapat pleno Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) terkait Pemetaan Urusan Pemerintahan dalam rangka kerja sama daerah tahun 2024 Nomor 100.3.7/1360/SETDA.Ks, tanggal 20 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024.
- KEDUA : Daftar rencana program dan kegiatan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA menjadi bahan rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang akan dibahas dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 5 Januari 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,



R. GANI MUHAMAD

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 100.3.7/Kep.54-KS/2024 TANGGAL 5 JANUARI 2024
TENTANG RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KERJA SAMA DAERAH PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN 2024

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KERJA SAMA DAERAH TAHUN 2024
PEMERINTAH KOTA BEKASI

NO	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Urusan Pemerintahan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Potensi	Keluaran/ Output	Hasil (Outcome)	Pelaksanaan (Tahun)	Jenis Kerja Sama Daerah	Perangkat Daerah / Pihak Terkait	Dukungan yang diperlukan	Keterangan
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Urusan Penunjang (Kepegawaian)	Program Kepegawaian Daerah	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan kenaikan Pangkat ASN	Pembuatan Naskah Soal Ujian Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas bagi PNS yang akan naik pangkat	Hasil dari pelaksanaan adalah pembuatan naskah soal ujian PI dan Ujian Dinas	Terlaksananya ujian PI dan Ujian Dinas	2024	Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK)	UNPAD	Dukungan yang diperlukan untuk merealisasikan kerjasama daerah meliputi: a. Anggaran b. Nota Kesepakatan	Masa berlaku PKS 1 Tahun
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Urusan Penunjang (Kepegawaian)	Program Kepegawaian Daerah	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	Penyelenggaraan Assesment Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Hasil dari pelaksanaan adalah hasil pengolahan data assesment	Terlaksananya assesment	2024	KSDPK	UNPAD	Dukungan yang diperlukan untuk merealisasikan kerjasama daerah meliputi: a. Anggaran b. Nota Kesepakatan	Masa berlaku PKS 1 Tahun
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Urusan Penunjang (Kepegawaian)	Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Assesment Center	penilaian Kompetensi manajerial dan sosio kultural	Hasil dari pelaksanaan Sub Kegiatan adalah ASN yang mengikuti penilaian kompetensi	Terlaksananya penilaian kompetensi aparatur	2023 - 2024	Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD)	Provinsi Jawa Barat	Dukungan yang diperlukan untuk merealisasikan kerjasama daerah meliputi: a. Anggaran b. Nota Kesepakatan	Masa berlaku PKS 2 Tahun (26 Juli 2022 - 26 Juli 2024) Perpanjangan PKS
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi	Urusan Penunjang (Kepegawaian)	Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	fasilitasi pelaksanaan pelatihan	Hasil dari pelaksanaan Sub Kegiatan adalah ASN yang mengikuti pelatihan teknis, pelatihan fungsional dan pelatihan sosiokultural	Hasil dari pelaksanaan adalah terlaksananya pelatihan teknis, pelatihan fungsional dan pelatihan sosiokultural	2024	KSDD	BPSDM Provinsi Jawa Barat, BPSDM Provinsi DKI Jakarta, PPSDM Regional Bandung	Dukungan yang diperlukan untuk merealisasikan kerjasama daerah meliputi: a. Anggaran b. Nota Kesepakatan	Masa berlaku PKS 1 Tahun
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Urusan Penunjang (Kepegawaian)	Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Objek yang dikerjakasikan dengan mitra kerjasama yaitu fasilitasi pelaksanaan pengiriman peserta pelatihan manajerial	Hasil dari pelaksanaan adalah pejabat Struktural yang mengikuti pelatihan manajerial (PKN Tk. II, PKA dan PKP)	Hasil dari pelaksanaan adalah terlaksananya pelatihan manajerial (Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II, Pelatham Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	2024	Sinergi	LAN RI, BPSDM Provinsi Jawa Barat	Dukungan yang diperlukan untuk merealisasikan kerjasama daerah meliputi: a. Anggaran b. Nota Kesepakatan	Masa berlaku PKS 1 Tahun
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Urusan Penunjang (Keuangan)	Program Pengelolaam Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya hasil koordinasi Pengelolaan kas Daerah	2024	KSDPK	BPKAD	Perjanjian Kerjasama BPKAD dengan BJB	1. PKS dengan BJB terkait penyimpanan Deposito; 2. PKS dengan BJB berakhir 14 Januari 2024 (Perpanjang setiap 3 tahun) 3. Permohonan perpanjangan PKS dar bjb di Bulan November 2023
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Urusan Penunjang (Keuangan)	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kepastian Hukum terhadap Tanah Milik Pemerintah Kota Bekasi di Karang Kitri Kelurahan Margahayu dan Tanah Mustika Pura yang berlokasi Jl. Juanda	Sertifikat Tanah atas nama Pemerintah Kota Bekasi	Terjaminnya Pengamanan Barang Milik Daerah	2024	KSDD	Semua PD se-Kota Bekasi	Dukungan yang diperlukan: 1. Anggaran; 2. Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi sebelumnya; Rencana objek lahan yang akan dilakukan Perjanjian terkait penyelesaian permasalahannya diantaranya yaitu Tanah Mustika Pura (PT. Jimmiriy), Karang kitri (PT. Rekapastika Asri), dan Tanah Kas Desa (TKD)	Bidang Aset: Belum pernah dilakukan Perjanjian dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi sebelumnya;

NO	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Urusan Pemerintahan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Potensi	Keluaran/ Output	Hasil (Outcome)	Pelaksanaan (Tahun)	Jenis Kerja Sama Daerah	Perangkat Daerah / Pihak Terkait	Dukungan yang diperlukan	Keterangan
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi	Urusan Penunjang (Keuangan)	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kepastian Hukum terhadap Tanah milik Pemerintah Kota Bekasi	Sertifikat Tanah atas nama Pemerintah Kota Bekasi	Terjaminnya Pengamanan Barang Milik Daerah	2024	Sinergi	Semua PD se Kota Bekasi	Dukungan yang diperlukan: 1. Anggaran; 2. Perjanjian Kerjasama dengan Pertanahan Kota Bekasi/ATR BPN; catatan: Perjanjian berlaku selama masih dibutuhkan sampai adanya perubahan; 3. Pengintegrasian dalam perencanaan daerah.	PKS setiap tahun diperbaharui
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Urusan Penunjang (Keuangan)	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kepastian Hukum terhadap Tanah milik Pemerintah Kota Bekasi	Jumlah Pemanfaatan BMD yang didampingi dan jumlah BMD yang di inventarisasi	Terjaminnya Pelaksanaan Pemanfaatan dan Penatausahaan BMD	2024	Sinergi	semua PKS	Perjanjian Kerjasama dengan KEJARI tentang Pendampingan Pemanfaatan dan Penatausahaan BMD	Bidang Aset;
3	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Urusan Penunjang (Perencanaan serta penelitian dan pengembangan)	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyusunan Dokumen RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 2. Penyusunan Dokumen RRPD Kota Bekasi Tahun 2025	1. Dokumen RPJPD Kota Bekasi Tahun 2025-2045 2. Dokumen RRPD Kota Bekasi Tahun 2025	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	2024	KSDPK	Bappelitbangda, IPB	Anggaran	Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi
	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Urusan Penunjang (Perencanaan serta penelitian dan pengembangan)	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan Monev Bantuan Keuangan DKI Jakarta	Terealisasinya Bantuan Keuangan DKI Jakarta yang sesuai dengan rencana	2024	KSDD	1. Bappelitbangda 2. Perangkat Daerah Penerima Bantuan Keuangan DKI Jakarta	Anggaran	Kerja Sama dengan Pemerintah DKI Jakarta
4	Badan Pendapatan Daerah	Urusan Penunjang (Keuangan)		Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Persepsi Tahun 2023		Pajak dan Retribusi Daerah	Optimalisasi pajak dan retribusi daerah	elayanan prima	Desember 2018 s.d Desember 2023 (5 Tahun)	KSDPK	PT. Bank Tabungan Negara	dukungan yang diperlukan untuk merealisasikan perjanjian kerjasama ini adalah pengintegrasian antara Bapenda dan Bank Presepsi dalam hal pembayaran pajak dan retribusi daerah	
	Badan Pendapatan Daerah	Urusan Penunjang (Keuangan)	Perogram Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penagihan Pajak Daerah	Piutang Pajak Daerah diatas 50 juta untuk pajak bumi dan bangunan (PBB) dan 10jt keatas untuk pajak daerah lainnya dan retribusi (IMB,Kekayaan Daerah)	keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak daerah dan peningkatan pendapatan daerah	Presentase Penerimaan PAD terhadap Pendapatan Daerah	2024	Sinergi	Kejaksanaan Negeri Kota Bekasi	Anggaran, MOU Pemerintah Kota Bekasi serta dukungan dari Dinas/ Terkait seperti: BPKAD, KSI, BAPELITBANGDA, Camat dan Lurah	
5	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Wisma Jaya	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola (Pasar Wisma Jaya)	2024	KSDPK	1. Disperkimitan Pemprov Jabar; 2. Dinas Perdagangan Pemprov Jabar; 3. Bappeda Pemprov Jabar; 4. Bappelitbangda Kota Bekasi 5.Disperkimitan Kota Bekasi; 6.DLH Kota Bekasi.	Anggaran untuk relokasi pedagang Pasar Wisma Jaya dan Pasar Bintara	Rencana aksi dengan Provinsi Jawa Barat
	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Bintara Jaya	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola (Pasar Bintara)	2024	KSDPK	1. Disperkimitan Pemprov Jabar; 2. Dinas Perdagangan Pemprov Jabar; 3. Bappeda Pemprov Jabar; 4. Bappelitbangda Kota Bekasi 5.Disperkimitan Kota Bekasi; 6.DLH Kota Bekasi.	Anggaran untuk relokasi pedagang Pasar Wisma Jaya dan Pasar Bintara	Rencana aksi dengan Provinsi Jawa Barat
	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Perindustrian	peningkatan sarana distribusi perdagangan	pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Pencegahan korupsi, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya	Pencegahandan penanganan masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Perjanjian Kerjasama Disdagperin dan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi	2024	Sinergi	Kejaksanaan Negeri Kota Bekasi	1. Anggaran; dan 2. Pengintegrasian dalam perencanaan daerah	

NO	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Urusan Pemerintahan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Potensi	Keluaran/ Output	Hasil (Outcome)	Pelaksanaan (Tahun)	Jenis Kerja Sama Daerah	Perangkat Daerah / Pihak Terkait	Dukungan yang diperlukan	Keterangan
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kerjasama sewa menyewa ruangan Gerai Pelayanan Publik Atrium Pondok Gede	Penyelenggaraan Gerai Pelayanan Publik Atrium Pondok Gede Kota Bekasi	Terselenggaranya pelayanan publik bagi masyarakat Kota Bekasi, yang berlokasi di Atrium Pondok Gede Kota Bekasi	2024	KSDPK	DPMPTSP Kota Bekasi	Sumber Daya Anggaran, Sumber Daya Manusia, Pengintegrasian layanan, Sistem IT dan Jaringan	PT. Kittita Alami Properindo (Pengelola Atrium Pondok Gede Kota Bekasi)
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	Pemberdayaan UMKM	Terisnya Gerai Promosi Investasi	Implementasi MOU Kota Bekasi dengan Kab. Bogor	2024	KSDD	Bagian Kerja Sama, Bagian Ekonomi, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bekasi	Dana APBD/DID	OPD KAB. Bogor
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kerjasama dalam Penempatan petugas FO pada pelayanan Polres Metro Bekasi Kota	Penempatan petugas FO pada pelayanan Polres Metro Bekasi Kota	Terlaksananya Penempatan petugas FO pada pelayanan Polres Metro Bekasi Kota	2024	Sinergi	DPMPTSP Kota Bekasi	Sumber Daya Manusia	Polres
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kerja Sama dalam Penempatan petugas FO pada pelayanan Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi	Penempatan petugas FO pada pelayanan Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi	Terlaksananya Penempatan petugas FO pada pelayanan Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi	2024	Sinergi	DPMPTSP Kota Bekasi	Sumber Daya Manusia	IMIGRASI
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kerja Sama dalam Penempatan petugas FO pada Pelayanan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi	Penempatan petugas FO Kejaksaan Negeri Kota Bekasi	Terlaksananya Penempatan Petugas FO pada pelayanan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi	2024	Sinergi	DPMPTSP Kota Bekasi	Sumber Daya Manusia	KEJAKSAAN NEGERI
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	program pendaftaran penduduk	Kerjasama pemanfaatan KIA dan KK dengan Dinas Pendidikan, RS, Klinik	Kerjasama pemanfaatan KIA/nilai tambah pemegang KIA	dengan menggunakan KIA masyarakat mendapatkan kemudahan	dapat meningkatkan minat warga mengurus pembuatan KIA	anak Kota Bekasi memiliki KIA (peningkatan cakupan pemilikan KIA)	Tahun 2024	KSDPK	Dinas Pendidikan, RS, Klinik	a. Anggaran b. Pengintegrasian dalam perencanaan Daerah c. Dukungan dari Pihak ke 3 untuk melaksanakan kerjasama	
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	program pencatatan sipil	pencatatan, penatausahaan dan penertiban dokumen atas pelaporan peristiwa penting	kerjasama pelayanan akta kelahiran, akta kematian dan akta perkawinan	kerjasama peningkatan pelayanan publik	terlaksananya perjanjian kerjasama peningkatan pelayanan publik	peningkatan cakupan akta kelahiran, akta kematian dan akta perkawinan	Tahun 2024	KSDPK	RS, KLINIK, SWASTA, Pengadilan Negeri,	a. Anggaran b. Pengintegrasian dalam perencanaan daerah c. dukungan dari stakeholder untuk melaksanakan kerjasama	
8	Dinas Sosial	sosial	perlindungan dan jaminan sosial	pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga	kerjasama penyaluran bantuan langsung tunai	jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kab/kota	presentase PPKS yang di bantu	2024	KSDPK	Kecamatan dan kelurahan	Data PPKS	PT. POS menyalurkan dana bantuan langsung Tunai (BLT)

NO	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Urusan Pemerintahan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Potensi	Keluaran/ Output	Hasil (Outcome)	Pelaksanaan (Tahun)	Jenis Kerja Sama Daerah	Perangkat Daerah / Pihak Terkait	Dukungan yang diperlukan	Keterangan
	Dinas Sosial	sosial	rehabilitasi sosial	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	penyediaan permakanaan	kerjasama permakanaan	jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanaan sesuai dengan standar Gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	PPKS yang tertangani	2024	KSDPK	Dinas Sosial	Proposal Kerjasama	Kerjasama dengan 20 Yayasan
	Dinas Sosial	sosial	rehabilitasi sosial	penanganan kesejahteraan sosial bagi PPKS		pendampingan lanjut usia terlantar	jumlah PPKS yang mendapatkan penanganan di rumah singgah	PPKS yang tertangani	2024	KSDPK	Dinas Sosial	Proposal Kerjasama	Kerjasama dengan Stikes Medistra
	Dinas Sosial	sosial	rehabilitasi sosial	penanganan rehabilitasi lanjut usia terlantar		Kerjasama penanganan rehabilitasi lanjut usia terlantar	jumlah PPKS yang mendapatkan penanganan di STPL	PPKS yang tertangani	2024	KSDPK	dinas sosial		Kerjasama dengan STPL Bekasi
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program perlindungan Khusus Anak	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/kota	penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	kerjasama pelaksanaan visum terhadap korban kekerasan bagi perempuan dan anak anak	jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan kewenangan kabupaten/kota	terpenuhinya layanan perlindungan anak	2024-2026	KSDPK	RSUD Chasbullah Abdulmadjid, Stikes Medistra	anggaran dan pengintegrasian dalam perencanaan daerah	kerjasama pemeriksaan visum bagi korban kekerasan
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Perempuan	penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	kerjasama pelaksanaan visum terhadap korban kekerasan bagi perempuan dan anak anak	jumlah perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan layanan pengaduan	terpenuhinya penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	2024-2026	KSDPK	RSUD Chasbullah Abdulmadjid, Stikes Medistra	anggaran dan pengintegrasian dalam perencanaan daerah	kerjasama pemeriksaan visum bagi korban kekerasan
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	koperasi, usaha kecil, dan menengah	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi	Kurasi dan Pemasaran Produk UMKM			2024	KSDPK	UNIQLO	1. Anggaran dan 2. Pengintegrasian dalam perencanaan daerah	
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	koperasi, usaha kecil, dan menengah	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan Pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi	Kurasi dan Pemasaran Produk UMKM			2024	KSDPK	Indomaret	1. Anggaran dan 2. Pengintegrasian dalam perencanaan daerah	
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	koperasi, usaha kecil, dan menengah	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi	Kurasi dan Pemasaran Produk UMKM			2024	KSDPK	GS Ritel	1. Anggaran dan 2. Pengintegrasian dalam perencanaan daerah	
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	koperasi, usaha kecil, dan menengah	Program pengembang	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha	produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya	Program jaminan tenaga kerja dan perlindungan sosial			2024	KSDPK	BPJS Ketenagakerjaan	1. Anggaran dan 2. Pengintegrasian dalam perencanaan daerah	

NO	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Urusan Pemerintahan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Potensi	Keluaran/ Output	Hasil (Outcome)	Pelaksanaan (Tahun)	Jenis Kerja Sama Daerah	Perangkat Daerah / Pihak Terkait	Dukungan yang diperlukan	Keterangan
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	koperasi, usaha kecil, dan menengah	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi usaha kecil	Produksi dan Pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi	Pemasaran produk UMKM			2024	KSDPK	Telkom	1. Anggaran dan 2. Pengintegrasian dalam perencanaan daerah	
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah				Pencegahan korupsi, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya	pencegahan dan penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara	Perjanjian Kerjasama DKUKM dan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi	2024	Sinergi		Kejaksaan Negeri Kota Bekasi	1. Anggaran dan Pengintegrasian dalam perencanaan Daerah
11	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup				Pengelolaan sampah melalui pemanfaatan ulang sampah dengan Pembangunan Sorting Centre dan Ecosystem Advance Recycling Kapasitas 80-100 Ton/Hari	terbangunnya sorting centre dan ecosystem advance recycling	Liquid Carbon, Bahan Kompos, Bahan Semen, Magot dan MoU Nomor 60/MoU/PemkotBekasi-W4C/07/2023 TAHUN 2023	2024	KSDPK	PT. Waste4Change	Pasokan sampah dan percepatan proses perijinan	
	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup				Pencegahan korupsi, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya	pencegahan dan penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara urusan lingkungan hidup di kota bekasi	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi	2024	Sinergi	Kejaksaan Negeri Kota Bekasi	1. Anggaran dan Pengintegrasian dalam perencanaan daerah	
12	Dinas Pendidikan	Pendidikan	Pendidikan dan tenaga kependidikan			Kerjasama Program Magang Guru Mengajar	Guru	Terpenuhinya kebutuhan guru	2024	KSDPK	PT. Wilayah Bekasi - Karawang- Jakarta	Anggaran	Mou dengan PT dan Pentahelix
	Dinas Pendidikan	Pendidikan	Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online		Kerjasama dengan wilayah perbatasan terkait dengan PPDB online			2024	KSDD	Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor	Anggaran	
13	Dinas Kesehatan	Kesehatan	Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Kerjasama PBI	Jumlah Penduduk sasaran PBI yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan di RD rujukan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan	cakupan pelayanan kesehatan rujukan (100%)	2024	KSDPK	Bagian Kerjasama, bagian Hukum, ITKO, BPKAD, Bappelitbangda, Dinas Sosial, Disdukcapil	Anggaran untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan	Kerjasama dituangkan ke dalam 1 Perjanjian
	Dinas Kesehatan	Kesehatan	Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	penyedia layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat dartaah kabupaten/kota	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	LKM NIK	Jumlah penduduk sasaran LKM NIK yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan di RS rujukan yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bekasi	cakupan pelayanan kesehatan rujukan (100%)	2024	KSDPK	Bagian Kerjasama, bagian Hukum, ITKO, BPKAD, Bappelitbangda, Dinas Sosial, Disdukcapil, BPJS Kesehatan	Anggaran untuk pembayaran tagihan pelayanan kesehatan Rp. 126.113.485.080	Kerjasama dituangkan ke dalam 1 dokumen untuk 1 rumah sakit
14	Dinas Pemadam Kebakaran	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Pananganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Perjanjian Kerjasama dalam Penanganan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran antar Daerah Perbatasan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perjanjian Kerjasama dalam Penanganan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran antar Daerah Perbatasan Kabupaten/Kota	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran - Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Pananganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota > Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2024	KSDD	1. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi 2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi	a. Anggaran b. Pengintegrasian dalam Perencanaan Daerah	1. Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta 2. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok

NO	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Urusan Pemerintahan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Potensi	Keluaran/ Output	Hasil (Outcome)	Pelaksanaan (Tahun)	Jenis Kerja Sama Daerah	Perangkat Daerah / Pihak Terkait	Dukungan yang diperlukan	Keterangan
15	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	pekerjaan umum dan penataan ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Rencana Pembangunan SPAM Mustika Jaya Kota Bekasi	1. Untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 3. Mendukung perkembangan sektor perumahan, perdagangan dan pendidikan 4. Menyediakan akses air minum layak dengan kuantitas, kualitas dan kontinuitas yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Menyiapkan Proyek SPAM di Kecamatan Mustika Jaya dan sekitarnya.	2024	KSD	Disperkimta Kota Bekasi, PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi, PDAM Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi	Anggaran	
16	Dinas Perhubungan	Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Meningkatkan kelancaran, ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di ruas jalan dan/atau persimpangan perbatasan Kota Bekasi dengan Pemkot Jakarta Timur (Pulogebang, Bintara, Sumber Arta, Pondok Melati dan Pondok Gede)	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tercapainya kelancaran, ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di ruas jalan dan/ atau persimpangan perbatasan Kota Bekasi dengan Pemkot Jakarta Timur (Pulogebang, Bintara, Sumber Arta, Pondok Melati dan Pondok Gede).	2024	KSD	Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur	Dukungan yang diperlukan untuk merealisasikan kerjasama daerah meliputi: a. Anggaran; b. Pengintegrasian dalam perencanaan daerah.	Pemprov DKI Jakarta
	Dinas Perhubungan	Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Meningkatkan kelancaran, ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di ruas jalan /atau persimpangan perbatasan Kota Bekasi dengan Pemkab Bekasi (Bulak Kapal, Jati Mulya, Indoporlend dan Teluk Pucung)	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tercapainya kelancaran, ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di ruas jalan/ atau persimpangan perbatasan Kota Bekasi dengan Pemkab Bekasi (Bulak Kapal, Jati Mulya, Indoporlend dan Teluk Pucung).	2024	KSD	Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi	Dukungan yang diperlukan untuk merealisasikan kerjasama daerah meliputi: a. Anggaran; b. Pengintegrasian dalam perencanaan daerah.	Pemerintah Kabupaten Bekasi
	Dinas Perhubungan	Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Meningkatkan kelancaran, ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di ruas jalan /atau persimpangan perbatasan Kota Bekasi dengan Pemkab Bogor (Jalan Siliwangi Narogong dan Jalan Transyogi)	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tercapainya kelancaran, ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di ruas jalan/ atau persimpangan perbatasan Kota Bekasi dengan Pemkab Bogor (Jalan Siliwangi Narogong dan Jalan Transyogi).	2024	KSD	Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor	Dukungan yang diperlukan untuk merealisasikan kerjasama daerah meliputi: a. Anggaran; b. Pengintegrasian dalam perencanaan daerah.	Pemerintah Kabupaten Bogor
	Dinas Perhubungan	Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Meningkatkan kelancaran, ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di ruas jalan /atau persimpangan perbatasan Kota Bekasi dengan Pemkot Depok (Jalan Transyogi)	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tercapainya kelancaran, ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di ruas jalan/ atau persimpangan perbatasan Kota Bekasi dengan Pemkot Depok (Jalan Transyogi).	2024	KSD	Dinas Perhubungan Kota Depok	Dukungan yang diperlukan untuk merealisasikan kerjasama daerah meliputi: a. Anggaran; b. Pengintegrasian dalam perencanaan daerah.	Pemerintah Kota Depok
17	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	pekerjaan umum dan penataan ruang	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Duplikasi Jembatan Besi Lingkak Utara	Terbangunnya duplikasi jembatan besi lingkak utara bekasi	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas masyarakat pengendara akibat kepadatan lalu lintas yang berkurang	2024	KSD	Dinas BMSDA Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi	Anggaran	
	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	pekerjaan umum dan penataan ruang	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan Akses Stasiun LRT Jatimulya	Terbangunnya Jembatan Akses Stasiun LRT Jatimulya	Meningkatnya aksesibilitas dan prasarana pendukung operasional stasiun LRT Jatimulya	2024	KSD	Dinas BMSDA Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi	Fisik Konstruksi	
	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	pekerjaan umum dan penataan ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	kerja sama dengan wilayah perbatasan terkait dengan Kajian Penanganan Banjir Kali Pete	Perlu Adanya kajian Penanganan Banjir di wilayah perbatasan	kajian Penanganan Banjir di wilayah perbatasan	2024	KSD	Dinas BMSDA Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi	Sinkronisasi Program Penanganan Banjir	

NO	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Urusan Pemerintahan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Potensi	Keluaran/ Output	Hasil (Outcome)	Pelaksanaan (Tahun)	Jenis Kerja Sama Daerah	Perangkat Daerah / Pihak Terkait	Dukungan yang diperlukan	Keterangan
	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	pekerjaan umum dan penataan ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	kerja sama dengan wilayah perbatasan terkait dengan Kajian Penanganan Banjir Di Perumahan Taman Rahayu	Perlu Adanya kajian Penanganan Banjir di wilayah perbatasan	kajian Penanganan Banjir di wilayah perbatasan	2024	KSD	Dinas BMSDA Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi	Sinkronisasi Program Penanganan Banjir	
	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	pekerjaan umum dan penataan ruang	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	kerja sama dengan wilayah perbatasan terkait dengan Kajian Penanganan Banjir Saluran Tana Pit	Perlu Adanya kajian Penanganan Banjir di wilayah perbatasan	kajian Penanganan Banjir di wilayah perbatasan	2024	KSD	Dinas BMSDA Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi	Sinkronisasi Program Penanganan Banjir	
18	Satuan Polisi Pamong Praja	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum	Penanganan gangguan Ketertiban Umum dalam satu daerah Kota/ Kabupaten	Pemberdayaan Satlinmas dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Prosentase penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada; 2. Prosentase penurunan Pelanggaran Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; 3. Ratio Satlinmas di tiap Kelurahan	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan linmas dalam ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2023	Sinergi	1. TNI (Bhabinsa) 2. Polri (Bhabinkamtibmas) 3. Kemendagri/ Provinsi Jawa Barat; 4. Bulog Cabang Karawang; 5. BPJS Ketenagakerjaan cabang Bekasi Kota; 6. PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara; 7. Tokoh Agama; 8. Tokoh Masyarakat		
19	Seluruh Perangkat Daerah	Seluruh Urusan Pemerintahan yang dibidangi Pemerintah Kota Bekasi	Program Perangkat Daerah	Kegiatan pada Perangkat Daerah	Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah	Pencegahan korupsi, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya	pencegahan dan penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara urusan perangkat daerah kota beklasi	Perjanjian Kerjasama antara Perangkat Daerah dan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi	2024	Sinergi	Kejaksaan Negeri Kota Bekasi	Anggaran	

WALI KOTA BEKASI,

 Gani Muhamad